

**PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENGERAKAN PARTISIPASI  
MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI DESA KEDUNGGUBAH  
KECAMATAN KALIGESING KABUPATEN PURWOREJO  
PROVINSI JAWA TENGAH**

(Sebuah Penelitian Deskriptif Kualitatif di Desa Kedunggubah  
Kecamatan Kaligesing, Kabupaten Purworejo,  
Propinsi Jawa Tengah)

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan



Oleh :

**LUKITO**

**NO. MHS : 12520178**

**SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”  
Y O G Y A K A R T A  
2 0 1 7**

## **HALAMAN PERSETUJUAN**

**PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENGERAKAN PARTISIPASI  
MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI DESA KEDUNGGUBAH  
KECAMATAN KALIGESING KABUPATEN PURWOREJO  
PROVINSI JAWA TENGAH**

(Sebuah Penelitian Deskriptif Kualitatif di Desa Kedunggubah  
Kecamatan Kaligesing, Kabupaten Purworejo,  
Propinsi Jawa Tengah)

### **SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi syarat guna mencapai derajat kesarjanaan  
jenjang Strata Satu Jurusan Ilmu Pemerintahan

Disusun oleh :

Nama : Lukito

No. Mhs : 12520178

Pembimbing,

**Dra. Herawati, MPA**

**JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN  
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA  
“APMD” YOGYAKARTA  
2017**

## HALAMAN PENGUJI

Skripsi ini telah dipertahankan di depan penguji

Jurusan Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa

“APMD” Yogyakarta pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 12 April 2017

Tempat : STMPD “APMD” Yogyakarta

Ketua Penguji / Pembimbing

**Gregorius Sahdan, S.IP, M.A** : .....

Penguji Pendamping I

**Drs. Jaka Tri Widaryanta, M.Si** : .....

Penguji Pendamping II

**Dra. Herawati, MPA** : .....

Mengetahui

Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan

**Gregorius Sahdan, S.IP, M.A**

## MOTTO

- ❖ Jika Anda ingin merubah suatu bangsa, maka rubahlah mulai dari dirimu sendiri, dan dari yang terkecil serta lakukan mulai saat ini juga.

(Abdullah Gymnastiar)

- ❖ Mencari ilmu itu wajib bagi tiap-tiap muslim laki-laki dan muslim perempuan.

(Hadist Nabi Muhammad SAW)

- ❖ Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali.

(Penyusun)

## **PERSEMBAHAN**

Kupersembahkan skripsi ini kepada :

1. Istri tercinta yang telah banyak memberikan dorongan, motivasi serta pendampingan selama ini.
2. Anak-anakku yang selalu mendukungku

## **KATA PENGANTAR**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji sukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayahNya sehingga kami dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan kelulusan guna memperoleh Gelar Sarjana pada Jurusan Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta tahun 2017.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Habib Mushin, S.Sos, M.Si, Ketua STPMD "APMD" Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu dan mengembangkan wawasan di kampus ini.
2. Gregorius Sahdan, S.IP, M.A, Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan, yang telah memberikan bimbingan dan motivasi.
3. Dra. Herawati, MPA, selaku Pembimbing yang telah meluangkan banyak waktu untuk membimbing hingga selesainya penyusunan skripsi ini.
4. Budiyanto, Kepala Desa Kedunggubah yang telah memberikan ijin untuk melanjutkan studi serta banyak membantu dalam perijinan dan pengumpulan data.
5. Semua pihak yang tidak dapat kami sebut satu persatu yang telah memberikan bantuan dalam penulisan skripsi ini.

Kiranya Allah SWT melimpahkan rahmat dan hidayahNya kepada kita semua yang telah membantu penulisan dan menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari banyak kekurangan dan kelemahan oleh karena itu penulis sangat mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun. Akhir kata semoga skripsi dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Amin

Yogyakarta, April 2017

Penulis

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN PENGUJI .....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR TABEL .....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiii
SINOPSIS .....	xiv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Kerangka Konseptual .....	8
1. Peran Pemerintah Desa .....	8
2. Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan .....	13
3. Pembangunan Desa .....	32
F. Ruang Lingkup Penelitian .....	43



	Halaman
G. Metode Penelitian .....	44
1. Jenis Penelitian .....	44
2. Unit Analisis .....	45
3. Teknik Pengumpulan Data .....	45
4. Teknik Analisis Data .....	47
<b>BAB II PROFIL DESA KEDUNGGUBAH.....</b>	<b>48</b>
A. Keadaan Geografis .....	48
B. Demografi .....	50
C. Keadaan Sosial Budaya .....	54
D. Kondisi Pemerintahan .....	55
<b>BAB III ANALISA DATA PERAN PEMERINTAH DESA UNTUK MENGERAKKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA</b>	
A. Deskripsi Informan .....	70
1. Informan Menurut Jenis Kelamin .....	70
2. Informan Menurut Pendidikan .....	71
3. Informan Menurut Jabatan .....	72
4. Informan Menurut Pekerjaan .....	73
B. Hasil Penelitian Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa .....	74
1. Peran Pemerintah Sebagai Dinamisator.....	74
2. Peran Pemerintah Sebagai Katalisator .....	79
3. Peran Pemerintah Sebagai Pelopor .....	83
4. Partisipasi Masyarakat .....	86

	Halaman
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....	95
A. Kesimpulan .....	95
B. Saran .....	96
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Luas Tanah Menurut Jenis Penggunaan .....	49
Tabel 2. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin .....	51
Tabel 3. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan .....	52
Tabel 4. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian .....	53
Tabel 5. Informan Menurut Jenis Kelamin .....	70
Tabel 6. Informan Menurut Pendidikan .....	71
Tabel 7. Informan Menurut Jabatan .....	72
Tabel 8. Informan Menurut Pekerjaan .....	73

## **DAFTAR GAMBAR**

	Halaman
Gambar 1. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Kedunggubah .....	58

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Ijin Penelitian
2. Surat Keterangan Penelitian
3. Daftar Pertanyaan
4. Hasil Wawancara

## SINOPSIS

Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Namun tujuan tersebut dapat terwujud apabila terdapat peran serta masyarakat bersinergi dengan pemerintah desa. Masyarakat harus didorong dan ditumbuhkan semangat partisipasinya melalui dukungan pemerintah. Berdasarkan latar belakang yang ada maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah peran pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Kedunggubah Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo?”.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yaitu jenis penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan permasalahan yang sedang terjadi berdasarkan kenyataan yang ada untuk memperjelas dan menganalisisnya. Unit analisis adalah masyarakat desa Kedunggubah Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo. Informan atau nara sumber diambil secara purposif dengan teknik *purposive* dari warga masyarakat sejumlah 15 orang. Teknik pengumpulan data dengan observasi, interview dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan teknik interpretatif yaitu dengan menggambarkan data yang diperoleh, dicari unsur pokok yang berkaitan dengan objek penelitian, kemudian menganalisisnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Sebagai dinamisor, peranan pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat bagi terlaksananya pembangunan sudah berperan dengan baik dalam rangka mengimplementasikan kebijakan sehubungan dengan peningkatan partisipasi masyarakat. Dilihat dari segi kemampuan pemerintah desa dalam menggerakkan partisipasi masyarakat sudah mampu, sesuai dengan informasi yang ada. (2) Sebagai katalisator pemerintah desa dan masyarakat desa Kedungsagubah saling bekerjasama melalui kegiatan koordinasi dalam mengawasi pelaksanaan pembangunan dari mulai perencanaan sampai pada evaluasi kegiatan. Hasil koordinasi dalam pengawasan pembangunan kemudian didiskusikan untuk dapat diketahui tingkat keberhasilan suatu kegiatan yang dilaksanakan. (3) Sebagai pelopot dalam bidang pembangunan dan kemasyarakatan sudah dapat dikategorikan berhasil, karena para pemerintah desa dan aparatur pemerintah sering terjun langsung ke lapangan untuk memberkan teladan, memantau ataupun untuk mengawasi langsung setiap kegiatan pembangunan yang sementara dilaksanakan.



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pelaksanaan otonomi daerah mengandung konsekuensi yang cukup menantang bagi daerah. Di satu sisi, kebebasan berkreasi membangun daerah benar-benar terbuka lebar bagi daerah. Namun demikian, di sisi yang lain telah menghadang setumpuk masalah yang harus diselesaikan. Masalah yang sangat mendasar adalah perubahan pola pengelolaan daerah dari sentralistik menjadi desentralisasi, misalnya sumber dana untuk membiayai pembangunan, sumber daya manusia sebagai aparat pelaksana seluruh aktivitas pembangunan, dan masih banyak yang lain. Pembangunan nasional dan daerah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan pembangunan desa. Desa merupakan basis kekuatan sosial ekonomi dan politik yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah.

Pada saat pola pemerintahan sentralistik, daerah menerima saja program-program yang telah dirancang dari pusat. Akan tetapi, sekarang ini daerah harus melakukan sendiri aktivitas perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan. Dengan beban pekerjaan yang semakin banyak tersebut, maka sumber daya manusia harus siap, baik jumlah maupun kualitasnya. Sedangkan dalam hal sumber pembiayaan pembangunan, daerah dituntut untuk mampu membiayai sebagian besar kegiatan pembangunannya, sehingga sekali lagi diperlukan sumber daya manusia yang kreatif yang dapat menghasilkan



pemikiran, konsep, dan kebijakan bagi pemenuhan sumber pembiayaan pembangunan.

Dengan lahirnya otonomi daerah serta dalam era globalisasi, maka pemerintah daerah dituntut memberikan pelayanan yang lebih prima serta memberdayakan masyarakat sehingga masyarakat ikut terlibat dalam pembangunan untuk kemajuan daerahnya, karena masyarakatlah yang lebih tahu apa yang mereka butuhkan serta pembangunan yang dilakukan akan lebih efektif dan efisien, dan dengan sendirinya masyarakat akan mempunyai rasa memiliki dan tanggung jawab.

Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Pada dasarnya pembangunan adalah merupakan suatu proses perubahan yang dilakukan secara sadar dan terencana melalui tahapan pembangunan yang bertujuan meningkatkan taraf hidup/kesejahteraan masyarakat. Konsep ini sejalan dengan tujuan nasional yaitu untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil, makmur dan merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila.

Perjalanan pemerintahan desa membutuhkan keterlibatan aktif dan keseriusan pemerintah setempat, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah kecamatan yang termasuk didalamnya adalah pemerintah desa.

Dalam memainkan perannya apabila pembangunan itu lebih diarahkan pada pembangunan di desa, maka pemerintah desa harus berperan aktif dan mengimplementasikan secara menyeluruh pelaksanaan pembangunan yang didasari pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masyarakat menginginkan peran yang lebih besar dari pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasinya berdasarkan undang-undang yang berlaku. Untuk menggerakkan masyarakat dalam partisipasinya terhadap pembangunan, diperlukan adanya tenaga/unsur penggerak yang mampu menggerakkan dan mengarahkan kemampuan masyarakat untuk dapat mewujudkan cita-cita pembangunan dalam hubungan ini. Kepala Desa memegang peranan yang menentukan untuk menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Sebagai pimpinan tertinggi dan penanggung jawab pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Kepala Desa harus mampu mengemban tugas yang dibebankan kepadanya terutama dalam menggerakkan masyarakat dalam kegiatan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Pada dasarnya pembangunan desa adalah merupakan suatu proses perubahan yang dilaksanakan di wilayah desa dan perubahan ini mengikutsertakan seluruh masyarakat untuk berpartisipasi baik dalam perencanaan, pelaksanaan, menikmati hasil pembangunan maupun dalam mengevaluasinya. Pemerintah Desa perlu menyusun perencanaan desa yang melibatkan seluruh komponen masyarakat desa. Proses perencanaan yang baik akan melahirkan pelaksanaan program yang baik, dan pada gilirannya akan

menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan desa. Proses merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi sendiri kegiatan pembangunan desa merupakan wujud nyata dari kewenangan mengatur dan mengurus pembangunan desa yang berskala lokal desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa, disebutkan bahwa Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Lebih lanjut dijelaskan, Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Kegiatan perencanaan pembangunan desa biasanya diawali dengan kegiatan Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang). Setiap tahun pada bulan Januari, biasanya diselenggarakan Musrenbang untuk menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa). Penyusunan dokumen RKP Desa selalu diikuti dengan penyusunan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), karena suatu rencana apabila tanpa anggaran seperti ini akan menjadi dokumen atau berkas belaka. Kedua dokumen ini tidak terpisahkan, dan disusun berdasarkan musyawarah dan mufakat. RKP Desa dan APB Desa merupakan dokumen dan informasi publik.

Pemerintah desa merupakan lembaga publik yang wajib menyampaikan informasi publik kepada warga masyarakat. Keterbukaan dan tanggung gugat kepada publik menjadi prinsip penting bagi pemerintah desa.

Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa. Musyawarah perencanaan pembangunan Desa diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan berbagai unsur masyarakat yang ada di desa. Selain unsur masyarakat tersebut, musyawarah perencanaan pembangunan Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Dalam proses pembangunan desa, dukungan dari masyarakat sangat diperlukan dalam usaha melaksanakan program-program pembangunan di pedesaan. Pelaksanaan pembangunan desa akan tercapai apabila melibatkan partisipasi dari masyarakat desa dalam setiap kegiatan. Dengan adanya partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan sangat diharapkan sekali baik pada tahap perencanaan, proses pembuatan keputusan maupun dalam pelaksanaan serta tanggung jawab atas keberhasilan pembangunan yang sedang dilaksanakan.

Partisipasi mempunyai peran penting di dalam suatu organisasi desa dalam mencapai tujuan. Semakin tinggi partisipasi masyarakat, semakin mudah masyarakat untuk berkembang. Partisipasi masyarakat adalah proses yang membutuhkan waktu dan kesadaran di dalam pembangunan untuk kemajuan ke

depan. Keterlibatan masyarakat merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari lembaga dimana masyarakat sebagai obyek dan subyek.

Dalam pembangunan infrastruktur desa harus lebih didasarkan atau ditentukan oleh masyarakat itu sendiri sehingga memungkinkan tumbuhnya keswadayaan/partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaannya. Di sisi lain, infrastruktur yang dibangun juga dapat menumbuhkan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat dalam mengelola dan memelihara setelah proyek tersebut berakhir, dan di dalam pembangunan infrastruktur desa hendaknya mempunyai sasaran yang tepat, sehingga sumber daya yang terbatas dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien (Suriadi, 2005: 61).

Peranan Pemerintah Desa dalam menggerakkan masyarakat meliputi 3 hal yaitu pembinaan masyarakat, pelayanan terhadap masyarakat dan pengembangan terhadap masyarakat. Pembinaan terhadap masyarakat meliputi kegiatan keagamaan, kegiatan sosial budaya dan pelayanan kesehatan, Pelayanan masyarakat meliputi pelayanan di bidang pertanian, kesehatan dan perekonomian, sedangkan pengembangan masyarakat lebih banyak difokuskan pada pengembangan SDM melalui pembangunan infrastruktur baik formal maupun non formal, termasuk pula diantaranya pengembangan ekonomi kerakyatan.

Kenyataan di lapangan yang terjadi adalah bahwa di Desa Kedunggubuh Kecamatan Kaligesing telah terlaksana berbagai macam bentuk pembangunan di tingkat desa namun ternyata partisipasi masyarakat belum optimal sehingga perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan

pembangunan belum dapat terlaksana dengan maksimal. Berdasarkan kenyataan inilah maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil tema peran pemerintah dalam menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa Kedunggubah Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat diajukan rumusan masalah sebagai berikut : Bagaimanakah peran pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Kedunggubah Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo ?.

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan untuk mengungkapkan dan mendeskripsikan peran pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Kedunggubah Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo sehingga diharapkan dengan pemahaman yang mendalam tentang partisipasi maka masyarakat akan terlibat aktif di dalamnya.

## **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Dapat mendeskripsikan peran pemerintah desa dalam menggerakkan partisipasi masyarakat di Desa Kedunggubah Kecamatan Kaligesing, Kabupaten Purworejo.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ach. Wazir Ws., *et al.*, ed. 1999. *Panduan Penguatan Menejemen Lembaga Swadaya Masyarakat*. Jakarta: Sekretariat Bina Desa dengan dukungan AusAID melalui Indonesia HIV/AIDS and STD Prevention and Care Project.
- Anwar. 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- H.A.R. Tillar. 2009. *Kekuasaan dan Pendidikan: Kajian Menejemen Pendidikan Nasional dalam Pusaran Kekuasaan*. Jakarta: Rinika Cipta.
- Haeruman. 2007. *Kemitraan dalam Pengembangan Ekonomi Lokal*. Jakarta : Yayasan Mitra Pembangunan Desa-Kota
- Hermansyah. 2007. *Analisis Psikografi Wisatawan dalam Keputusan Memilih Objek dan Daya Tarik Wisata Gunung Dempo di Kota Pagar Alam*. Tesis. Yogyakarta: Magister Kajian Pariwisata Universitas Gadjah Mada.
- Huraerah, Abu. 2008. *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat, Model dan Strategi Pembangunan*. Bandung : Humaniora.
- Ife, Jim dan Frank Tesoriero. 2008. *Alternatif Mengembangkan masyarakat di Era Globalisasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Irene, Siti Astuti D. 2009. *Desentralisasi dan Partisipasi dalam Pendidikan*. Yogyakarta : UNY.
- Juliantara. Dadang. 2005. *Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaruan.
- Kartasasmita, Ginanjar. 1994. *Manajemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang*. Jakarta : PT Gelora Aksara Pratama.
- Koentjaraningrat, 1971, *Rintangan-Rintangan Mental Dalam Pembangunan Ekonomi di Indonesia*, Bharata, Jakarta.
- Korten, David, dan Sjahrir, 1988, *Pembangunan Berdimensi Kerakyatan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Maskun, Sumitro, 1993, *Pembangunan Masyarakat Desa*, Media Widya Mandala, Yogyakarta.

- MPR-RI, 1999, *Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1999*, CV. Kurnia, Jakarta.
- Mikkelsen, Britha. 1999. *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-upaya Pengaman Sosial*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Moleong, Lexy J., 1990, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Ndraha, Taliziduhu. 1997. *Metodologi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Rogers, Everett M & Soemaker, F.Floy, 1981, *Memasyarakatkan Ide Baru*, Usaha Nasional, Surabaya.
- Riyadi dan Bratakusumah. 2005. *Perencanaan Pembangunan. Daerah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Tabeko, B. Soleman B. 1984. *Struktur dan Proses Sosial Suatu Pengantar Sosiologi Pembangunan*. Jakarta: Rajawali.
- Tikson, T. Deddy. 2005. *Administrasi Pembangunan*. Bandung : Alfabeta.
- Soekanto, Soerjono. 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Soetomo, 1990, *Pembangunan Masyarakat: Beberapa Tinjauan Kasus*, Liberty, Yogyakarta.
- Siagian, Sondang P. 2004. *Administrasi Pembangunan*. Gunung Agung, Jakarta.
- Sugiyah. 2001. *Partisipasi Komite Sekolah dalam Penyelenggaraan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional di Sekolah Dasar (SD) Negeri IV Wates, Kabupaten Kulon Progo*. Tesis. PPs - UNY.
- Sukirno, Sadono. 2005. *Mikro Ekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Sutrisno, Loekman. 1995. *Menuju Masyarakat Partisipatif*. Yogyakarta : Kanisius.
- Undang-Undang No. 5 Th. 1979, *Pemerintahan Desa*, Departemen Dalam Negeri, Jakarta.
- Undang-Undang No. 22 Th. 1999, *Pemerintahan Daerah*, PT. Kuraiko Pratama, Bandung.
- Widjaja, HAW., 2003, *Pemerintahan Desa Marga*, PT Grafindo Persada, Jakarta.